



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

GOVERNANCE UNTUK MEWUJUDKAN BLUE ECONOMY YANG BERKEADILAN

Stephanie Juwana, S.H., LL.M.

POTENSI EKONOMI BIRU



PNBP SDA
Perikanan
baru
menyumbang
0.16%



5.000-90.000 kapal melewati ALKI 1 tiap tahun, 10.000 ALKI 2, 5.000 ALKI 3



Wisata bahari hanya berkontribusi 4% terhadap national income dan 10% terhadap foreign exchange.



Mangrove dan padang lamun memiliki nilai ekonomi karbon yang tinggi



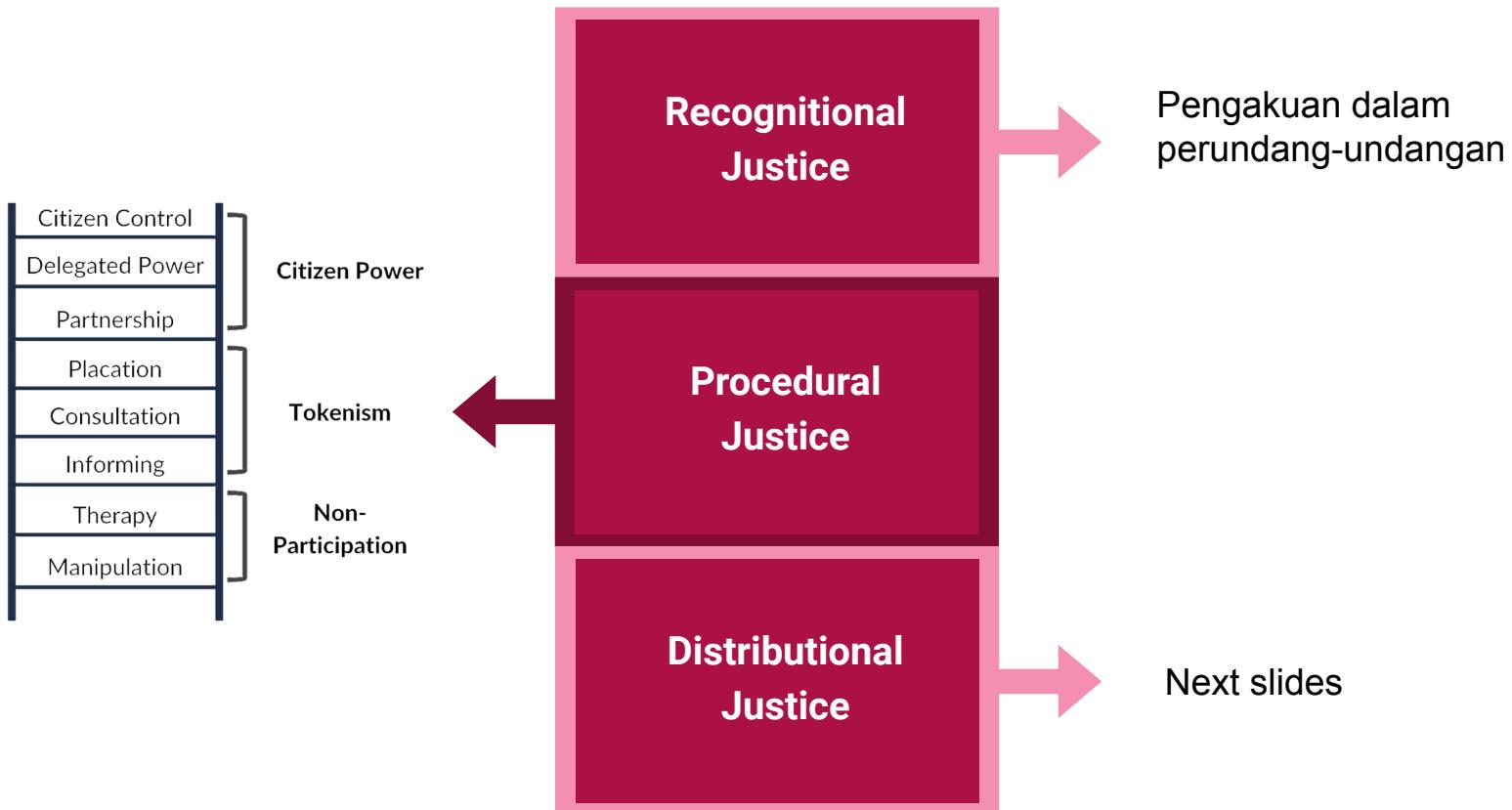
Legend: ● SDG achieved ● Challenges remain ● Significant challenges remain ● Major challenges remain ● Information unavailable

10 Main Injustices (Bennett, et al., 2020)

1. Perampasan (dispossession), pemindahan (displacement) dan ocean grabbing;
2. Ketidakadilan lingkungan dari pencemaran dan limbah;
3. Degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan layanan ekosistem;
4. Dampak mata pencaharian bagi nelayan skala kecil;
5. Hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan;
6. Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata;
7. Dampak sosial dan budaya dari pembangunan laut;
8. Marginalisasi perempuan;
9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
10. Pengecualian dari pengambilan keputusan dan tata kelola.

OCEAN INJUSTICES

MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM EKONOMI BIRU



MEWUJUDKAN OCEAN EQUITY

Estimasi potensi SDI di WPP 718 merupakan tertinggi dibandingkan dengan WPPNRI lainnya, namun nilai Produk Domestik Regional Bruto dan nilai ekspor perikanan yang masih di dominasi di wilayah WPPNRI 712 dan 571 (lihat slide selanjutnya).

No	WPPNRI	Deskripsi Wilayah
1	571	Selat Malaka dan Laut Andaman
2	572	Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda
3	573	Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusantara, Laut Savu, dan Laut Timor bagian barat
4	711	Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
5	712	Perairan Laut Java
6	713	Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
7	714	Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8	715	Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
9	716	Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
10	717	Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
11	718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Satuan : Ton Per Tahun

ESTIMASI POTENSI SDI MENURUT WPPNRI TAHUN 2017

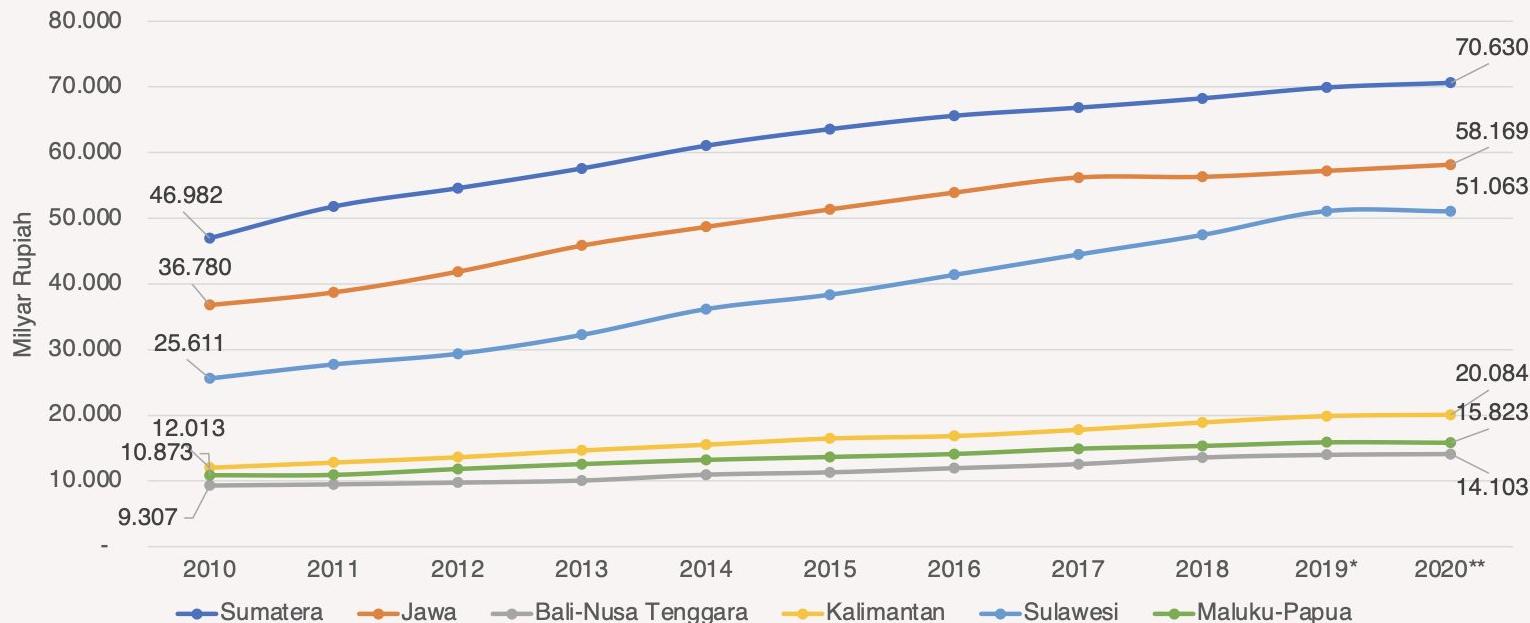


Sumber : Kepmen KP No 50 Tahun 2017

MEWUJUDKAN OCEAN EQUITY

PDRB PERIKANAN MENURUT PULAU PERIODE 2010-2020

PDRB Perikanan Pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi merupakan terbesar dibandingkan tiga pulau lainnya



Mengetahui Tingkat Keadilan dalam Pemanfaatan Laut dan Perlindungan HAM

A sustainable ocean economy cannot be achieved while many millions of people remain in poverty and inequality is systemic.

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin (Semester 1 Tahun 2020)
Papua	26,64%
Papua Barat	21,37%
Maluku	17,44%
Nusa Tenggara Timur	20,90%

Laut Arafura (yang berada di bawah Pulau Papua) kaya akan sumber daya ikan



→ Maluku disebut sebagai Lumbung Ikan Nasional



Beberapa destinasi bahari favorit terletak di NTT

Pelanggaran HAM Anak Buah Kapal WNI yang Bekerja di Kapal Ikan Asing

Tidak adanya data yang jelas atas jumlah ABK Indonesia dan wilayah penempatannya serta tidak adanya sinergi antara kementerian/lembaga mempersulit upaya pengawasan dan perlindungan ABK yang bekerja di Kapal Ikan Asing. Hal tersebut meningkatkan kerentanan ABK Indonesia untuk menjadi korban kerja paksa (*forced labour*) dan *human trafficking*.

Kementerian Luar Negeri mencatat selama tahun 2013-2015 setidaknya terdapat 217.665 orang ABK Indonesia yang bekerja di Kapal Taiwan dan 31.792 orang yang bekerja di Kapal Korea Selatan.

(Dit. PWNI BHI, Kemlu)

BNP2TKI (sekarang disebut BP2MI) mencatat selama tahun 2011-2019 terdapat 30.864 orang bekerja di luar negeri sebagai ABK. Mayoritas dari ABK Indonesia berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.

(BNP2TKI 2013, 2018, 2019).

MEWUJUDKAN OCEAN EQUITY

Table 1. Overview of Opportunities for Action for Achieving Equity in a Sustainable Ocean Economy

SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY EQUITY		
SAFEGUARDS <i>No Regrets</i>	MAINSTREAMING EQUITY <i>Doing What's Right</i>	TRANSFORMATIVE APPROACHES <i>The Bold Policies</i>
<ul style="list-style-type: none">■ In development activities and conservation initiatives, engage and include developing states and local populations in decision-making processes.■ Recognise the rights, roles and needs of women, indigenous groups, small-scale fishers, individuals with disabilities, and other minority groups and lift existing access barriers.■ Protect human rights and the rights of indigenous groups.■ Address corruption and tax evasion. Investigate and pilot approaches to limits on growth and degrowth.	<ul style="list-style-type: none">■ Recognise, protect and operationalise equity and access rights.■ Build local capacity—including access to low-cost and accessible technologies—to establish equality of opportunity.■ Understand social-ecological causality in ocean environments to assign responsibility and liability, and secure an equitable distribution of social gains.■ Demand, require and stimulate transparent, responsible business practices.	<ul style="list-style-type: none">■ Create a shared ocean economy that facilitates redistribution of wealth and benefits.■ Democratise ocean knowledge.■ Create inclusive governance processes by incorporating local voices and visions into plans for the ocean economy, at all scales.■ Be aware of environmental and social limits on growth and consider degrowth.

GOVERNANCE ORDERS

Third Meta Governance Orders includes values, images, norms, and principles within a particular governance system at various scales.

Second Governance Order, how state supplies justice deliverables to the people through norms, regulations and cognitive. Institutions rely on all of them.

First Governance Order, refers to the power relational skills in exercising one and two and the community's ability to defend and strive their rights.

MEANS OF GOVERNANCE:

1. Mechanisms and processes;
2. Institutions;
3. Rule of law.

REFLEKSI

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan?
2. Apakah kelembagaan sudah kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan?
3. Apakah masyarakat memahami mengenai hak *access to justice* mereka?

TRANSPARANSI

Landasan Yuridis

1. Konstitusi
2. UU Keterbukaan Informasi Publik
3. UU Perikanan
4. UU PWP3K
5. PermenKP

MENGAPA TRANSPARANSI PENTING:

1. Mengetahui potensi yang dimiliki untuk menjadi bahan dasar pembuatan kebijakan;
 2. Mengawasi tingkat kepatuhan pelaku usaha;
 3. Mengawasi pejabat publik;
 4. Membantu proses penegakan hukum.
-
1. Hasil evaluasi oleh DJPT KKP pada tahun 2019 ditemukan bahwa terdapat praktik *underreporting* pada pelaporan LKU dan LKP.
 2. Keterbukaan mengenai jumlah kapal yang diberikan izin dapat membantu masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan perikanan agar berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pengembangan Ekonomi Biru tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan dari sektor kelautan, namun juga harus memperhatikan aspek keadilan.
2. Aspek keadilan dapat dituangkan pada *recognitional, procedural, dan distributional justice*.
3. Mewujudkan Ekonomi Biru yang berkeadilan membutuhkan reformasi *governance* yang terdiri dari 3 *governance orders and means*.
4. Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam *governance*.